

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas belanja bantuan sosial dilihat dari segi anggaran pada LRA, capaian masyarakat yang menerima bantuan sosial PKD pada LPPD, dan jumlah tidaksesuaian yang menjadi temuan pada LHP BPK. Sebagaimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Teori Jonathan Koppell (Koppell, 2005) telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya pengelolaan belanja bantuan sosial dengan menerapkan dimensi transparansi, dimensi liabilitas, dimensi kontrol, dimensi responsivitas, dan dimensi tanggung jawab.
2. Efektivitas dalam pengelolaan belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan tidak efektif dilihat dari sisi anggaran dalam LRA dengan rata-rata 96,51% dan capaian jumlah masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2020-2022 yaitu dengan rata-rata 99,33%, tetapi pada capaian jumlah masyarakat yang terpenuhi dalam penyaluran bantuan sosial PKD tahun 2019 dikatakan bahwa pengelolaan bantuan sosial sudah efektif, sedangkan jika dilihat dari perhitungan hasil temuan BPK pada LHP BPK dapat

dikatakan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ketidaksesuaian penerimaan bantuan sosial semakin berkurang.

3. Transparansi dalam akuntabilitas belum dapat meningkatkan efektivitas belanja bantuan sosial secara keseluruhan, akan tetapi dengan terciptanya transparansi dapat mengurangi ketidaksesuaian data dalam temuan LHP BPK, transparansi ini juga terus ditingkatkan melalui proses pepadanan data atau verifikasi data.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti dapat memberikan beberapa implikasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dibagi menjadi implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur untuk studi mendatang yang akan menyelidiki tema yang sama yaitu terkait penerapan akuntabilitas belanja bantuan sosial dengan menggunakan indikator lima dimensi dari Teori Jonathan Koppell (Koppell, 2005) dan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait akuntabilitas pelaporan keuangan belanja bantuan sosial.

### **2. Implikasi Praktis**

#### **a) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih meningkatkan kemampuan pegawai bagian verifikator agar data terus diperbarui setiap ingin melakukan pencairan dana bantuan sosial

b) Bagi Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan Pemeirntah Desa

Pemerintah Provinsi dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap verifikator data bantuan sosial di Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan Desa agar tidak terjadinya perbedaan data pada jangka waktu tertentu.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

penelitian ini memiliki keterbatasan berdasarkan jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti berikut:

1. Ada sedikit referensi dari penelitian sebelumnya, sehingga indikator untuk mengukur penerapan akuntabilitas dan efektivitas dari segi capaian jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial harus dikembangkan kembali.
2. Responden sebagai sumber data sangat terbatas.

### **D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik.

Beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa penelitian selanjutnya akan mencakup lebih dari satu pemerintahan daerah agar hasil dari penerapan akuntabilitas dan efektivitas dapat dibandingkan.
2. Disarankan melakukan komunikasi dengan instansi yang menjadi objek penelitian dari tiga bulan sebelum wawancara, agar mendapatkan responden yang cukup sesuai dengan tujuan penelitian seperti Kepala Bidang terkait